

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

8 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Sustainable Leadership dalam Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Novy Setia Yunas^a

^aProgram Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya
e-mail : novysetiayunas@ub.ac.id

Abstrak

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) kini telah memasuki *Decade of Action*, dengan sisa waktu tujuh tahun untuk mencapai Agenda 2030 dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan yang ada. Di era *Decade of Action* saat ini yang dibutuhkan adalah aksi dan strategi yang konkrit untuk mewujudkan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Salah satu aspek mendasar yang dibutuhkan dalam upaya mendorong akselerasi target pembangunan berkelanjutan adalah formula maupun model kepemimpinan berkelanjutan. Artikel ini merupakan hasil penelitian menggunakan metode *literature review* yang akan memberikan insight baru tentang konsep maupun model *sustainable leadership* yang merupakan salah satu bagian penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Model kepemimpinan berkelanjutan memang harus dimiliki dan dipedomani oleh seorang pemimpin baik di level Nasional maupun Daerah. Melalui lima karakter mendasar yang harus dimiliki oleh seorang *sustainable leadership*, yakni kepemilikan moral-driven; cara berpikir yang holistik; berpikiran terbuka; sikap empati dan yang terakhir adalah keberanian mewujudkan visi. Sehingga, model ini dinilai memiliki peran yang cukup sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya itu, aspek kepemimpinan saja tidaklah cukup, diperlukan kolaborasi dengan semua pihak, baik dari sektor swasta, kelompok masyarakat sipil (NGO/CSO), akademisi hingga media. Sebagaimana praktik-praktik baik yang telah berkembang di berbagai daerah.

Kata Kunci: Pembangunan Berkelanjutan; SDGs; Kolaborasi; Kepemimpinan; *Sustainable Leadership*.

Sustainable Leadership in Efforts to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs)

Abstract

Achieving the sustainable development goals (SDGs) has now entered the Decade of Action, with seven years remaining to achieve the 2030 Agenda in facing various existing changes and challenges. In the current era of the Decade of Action, what is needed is concrete action and strategy to realize the achievement of sustainable development goals. One of the fundamental aspects needed in efforts to encourage the acceleration of sustainable development targets is a sustainable leadership formula and model. This article is the result of research using the literature review method which will provide new insight into the concept and model of sustainable leadership, which is an important part of achieving sustainable development goals. A sustainable leadership model must be owned and guided by a leader at both the National and Regional levels. Through five fundamental characters that a sustainable leader must have, namely moral-driven ownership; holistic way of thinking; open minded; empathy and finally the courage to realize the vision. Thus, this model is considered to have a fairly central role in realizing sustainable development. Not only that, the leadership aspect alone is not enough, collaboration is needed with all actors, from the private sector, civil society groups (NGO/CSO), academics and media. As good practices have developed in various regions.

Kata Kunci: Sustainable Development; Collaboration; Leadership; *Sustainable Leadership*.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

8 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu formula penting dalam sebuah Negara yang digunakan untuk mengatasi berbagai problem di tengah-tengah masyarakat. Namun, saat ini di tengah dinamika kehidupan di tingkat global, nasional hingga lokal yang sarat akan kompleksitas masalah dan kebutuhan masyarakat, maka proses-proses pembangunan dituntut untuk semakin teliti dan jeli melihat berbagai persoalan tersebut. Konsep Pembangunan berkelanjutan menjadi sebuah alternatif yang kini digunakan untuk merespon dinamika kehidupan yang makin kompleks. Secara garis besar, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan terutama relasi antara aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (Nurbaiti et al., 2023).

Sejak awal, konsep pembangunan berkelanjutan memang di desain bahwa pembangunan memang difokuskan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup pada masa kini, namun tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa, pembangunan berkelanjutan harus mampu menyeimbangkan aspek-aspek kehidupan yang fundamental di dalam masyarakat mulai dari aspek sosial, budaya, politik, ekonomi hingga keberlanjutan ekologis (lingkungan hidup) (Artisa, 2023).

Jika merujuk pada perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan yang menjadi pedoman global saat ini, memang tidak diragukan lagi bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan mempunyai arti penting bagi setiap negara di seluruh dunia. Hal ini secara inheren terkait dengan kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera secara ekonomi. Oleh karena itu, pada bulan September 2020, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan KTT Milenium, di mana 189 negara anggota secara kolektif mendukung dan mendeklarasikan

Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Pernyataan ini merupakan wujud nyata upaya kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas global. MDGs mencakup 8 tujuan yang komprehensif, yang dijadwalkan untuk dicapai pada tahun 2015, masing-masing disertai dengan serangkaian tolok ukur yang relevan (Kharisma, 2014).

Selama 15 tahun, agenda Millennium Development Goals (MDGs) telah dilaksanakan di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan telah mencapai banyak keberhasilan. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa hal yang memerlukan perbaikan. Hal ini yang kemudian mendorong hadirnya agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2015, yang merupakan penyempurnaan dari Agenda Pembangunan Global sebelumnya. SDGs menekankan pentingnya tidak hanya mengembangkan sumber daya manusia tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang mempertimbangkan faktor lingkungan dan praktik berkelanjutan (UNDP, 2022). Dengan menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, SDGs bertujuan untuk memastikan bahwa hasil upaya pembangunan berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia.

Keberhasilan pembangunan bergantung pada perilaku manusia terhadap alam dan pemanfaatannya untuk kebaikan generasi sekarang dan mendatang. SDGS mencakup total 17 tujuan yang dikategorikan ke dalam 4 pilar, yang semuanya saling berhubungan dan bergantung satu sama lain (Suparmoko, 2020). Keempat pilar tersebut menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan harmonis antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, yang kesemuanya didukung oleh pilar tata kelola. Penting untuk menyadari bahwa ketiga pilar ini saling terkait dan tidak dapat dianggap terpisah. Meskipun pilar ekonomi menekankan pentingnya pertumbuhan saat ini, pilar lingkungan hiduplah yang lebih

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

8 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

diutamakan, karena pilar ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Begitu pula dengan perilaku sosial masyarakat yang digambarkan dalam pilar sosial, perlu diubah dan memiliki perilaku ramah lingkungan (Khairina et al., 2020).

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ini tentu tidaklah mudah ketika ditinjau pada konteks secara lokal maupun dalam sektor privat (Afandi et al., 2021; Agustina dan Pradesa, 2024), terutama dalam potensi hal – hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi (Taufik et al., 2022). Namun harus diupayakan agar kemudian Negara mampu mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Sehingga, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ini mutlak membutuhkan komitmen politik dan kepemimpinan yang baik dari stakeholder terkait. Sebuah visi, misi dan inisiatif tentu tidak akan dapat diwujudkan tanpa adanya komitmen politik dari pemerintah sebagai regulator. Komitmen politik yang dibangun tentu harus diwujudkan melalui dukungan kebijakan (*policy*) dan anggaran yang cukup untuk mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya itu saja, kepemimpinan juga menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu model kepemimpinan yang inheren dengan kebutuhan akan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan adalah *sustainable leadership*. Mungkin sebagian orang masih asing mendengar konsep kepemimpinan tersebut. Berbeda dengan konsep-konsep kepemimpinan seperti *transformational leadership* yang mungkin sangat akrab di telinga masyarakat. Padahal, konsep pemimpin berkelanjutan (*sustainable leadership*) ini bersumber dari gagasan Fabio dan Peiro (2018), yang berfokus pada keberlanjutan sumber daya manusia yang dapat mendukung pengembangan organisasi yang berkelanjutan. Selain itu, Fabio dan Peiro (2018) memberikan penekanan bahwa seorang pemimpin hendaknya fokus pada promosi sumber daya dan kesejahteraan di tingkat individu dan organisasi yang dapat

berkontribusi terhadap pekerja dan organisasi yang lebih produktif dan efisien. Dengan kata lain, seorang pemimpin harus berbicara dampak jangka panjang. Hal yang paling penting tentang pemimpin keberlanjutan adalah pemimpin tersebut harus mampu melihat sebab-akibat secara jangka panjang (Di Fabio & Peiró, 2018). Sederhananya bahwa konsep kepemimpinan keberlanjutan (*sustainable leadership*) merupakan sebuah konsep yang mendasarkan pada pola pikir bahwa pemimpin harus memiliki komitmen nyata untuk menyelesaikan tujuan yang tertuang dalam 17 Sustainable Development Goals (SDGs).

Artikel ini diharapkan dapat memberikan *insight* baru tentang model kepemimpinan berkelanjutan (*sustainable leadership*) yang berkontribusi mendasar pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di sebuah Negara, tak terkecuali di Indonesia. Realitanya memang, masih banyak yang belum mampu melihat secara komprehensif gagasan yang dikemukakan oleh Fabio dan Peiro (2018) tersebut. Padahal, dengan memahami konsep maupun model kepemimpinan ini tentu akan memudahkan seorang pemimpin baik di berbagai level pemerintahan untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang tentu membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Tulisan ini juga akan menampilkan hasil riset-riset sebelumnya yang telah dilakukan penulis, sebagai bentuk refleksi terhadap praktik-praktik baik keberhasilan pemimpin di berbagai daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di berbagai level pemerintahan.

B. PEMBAHASAN

Sejak September 2015, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) telah diadopsi secara global sebagai sebuah komitmen bersama. Indonesia secara konsisten menunjukkan dukungannya terhadap pencapaian target yang ditetapkan SDGs. Implementasi tujuan-tujuan ini di Indonesia selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Hasilnya, pemerintah telah mengintegrasikan target SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Prinsip universal, inklusif,

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

8 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

dan partisipatif yang mendasari implementasi SDGs di Indonesia juga menjadi landasan dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 hingga 2022 lalu, yang tentu berdampak signifikan pada berbagai aspek pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai salah satu otoritas penting di negeri ini yang mendorong upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2023 lalu telah merilis target capaian SDGs di Indonesia. Data Bappenas menunjukkan bahwa dari hasil analisis terhadap 224 indikator SDGs yang tersedia datanya pada laporan tahun 2022 lalu, 62% atau 138 indikator telah mencapai target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Nasional (RAN) tahun 2021–2024 untuk tahun 2022. Jika ditambahkan dengan 14% atau 31 indikator yang menunjukkan tren membaik atau akan tercapai, maka terdapat sekitar 76% indikator SDGs yang mengalami kemajuan menuju pencapaian yang lebih baik. Akan tetapi, diperlukan perhatian khusus pada sekitar 24% atau 55 indikator yang berisiko tidak tercapai. Dilihat dari capaian masing-masing pilar pembangunan SDGs, seluruh pilar telah mengalami kemajuan yang baik dalam dalam pencapaian target tahun 2022, dan kemajuan yang cukup besar terlihat pada pilar pembangunan lingkungan hidup serta pilar hukum dan tata kelola. Namun masih terdapat 63 indikator yang belum tersedia datanya sehingga belum memungkinkan untuk menilai kemajuannya pada tahun 2022 lalu (Bappenas, 2023).

Di tengah tantangan global yang makin dinamis saat ini dalam pencapaian SDGs ini, Indonesia telah menunjukkan progres yang cukup baik. Berdasarkan *Sustainable Development Report 2023* (SDSN), Indonesia saat ini berada di peringkat ke-75, naik signifikan dibandingkan posisi Indonesia empat tahun lalu yang hanya mampu mencapai peringkat 102. Saat ini yang harus menjadi perhatian bersama adalah tahapan implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) kini telah memasuki *Decade of Action*, dengan sisa waktu tujuh tahun untuk mencapai Agenda 2030 dalam

menghadapi berbagai perubahan dan tantangan yang ada. Di era *Decade of Action*, aksi dan strategi yang konkrit harus dipahami sebagai tanggung jawab semua pihak: tidak hanya pemerintah, namun lembaga-lembaga non pemerintahan (NGO) juga harus berperan penting dalam bekerja sama mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Kolaborasi yang lebih erat serta ko-kreasi antara pemerintah dengan aktor non pemerintah (*non state actors* atau NSA) khususnya pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, media, serta berbagai organisasi/kelompok lainnya; dan Keterlibatan publik/warganegara dalam berbagai praktik pembangunan. Prinsip-prinsip partisipatif sekali lagi merupakan kunci dari kolaborasi sejati ini (Bappenas, 2023). Tidak hanya itu, aspek kepemimpinan di tingkat nasional dan daerah yang memprioritaskan dan mengarusutamakan visi TPBSDGs secara tegas dalam rencana pembangunannya, harus dipandang menjadi salah satu hal penting yang dapat mendorong akselerasi pencapaian target SDGs di berbagai level pemerintahan.

Tentu semua mengetahui bahwa aspek kepemimpinan memegang peran yang sangat strategis dalam sebuah organisasi. Werren dan Burt (2006) memberikan gambaran bahwa kepemimpinan merupakan kekuatan yang sangat penting dibalik kekuasaan berbagai organisasi, termasuk didalamnya adalah birokrasi dan bahwa untuk menciptakan organisasi yang efektif maka ruang lingkup kerja mengenai apa yang bisa dicapai, kemudian memobilisasi organisasi itu untuk berubah kearah visi baru tersebut (Nanus, 2006). Tidak dapat dipungkiri bahwa kesuksesan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh faktor kepemimpinan tersebut. Sehingga diperlukan sebuah formula atau model kepemimpinan yang sejalan dengan upaya-upaya akseleratif pada masa *Decade of Action* target SDGs di tahun 2030 mendatang.

Kepemimpinan keberlanjutan dinilai menjadi sebuah formula kepemimpinan yang cukup penting yang berdasarkan pola pikir bahwa seorang pemimpin harus memiliki komitmen nyata untuk menyelesaikan tujuan yang

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

8 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

tertuang dalam 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Gagasan tentang kepemimpinan keberlanjutan atau yang sering disebut dengan *sustainable leadership* muncul dari Fabio dan Peiro (2018) dalam artikelnya yang berjudul Human Capital Sustainability Leadership to Promote Sustainable Development and Healthy Organizations: A New Scale. Fabio dan Peiro (2018) memberikan penekanan bahwa seorang pemimpin hendaknya fokus pada promosi sumber daya dan kesejahteraan di tingkat individu dan organisasi yang dapat berkontribusi terhadap pekerja dan organisasi yang lebih produktif dan efisien. Hal yang paling penting tentang pemimpin keberlanjutan adalah seorang pemimpin harus mampu melihat sebab-akibat secara jangka panjang (Di Fabio & Peiró, 2018).

Di dalam konsep *sustainable leadership*, seorang pemimpin keberlanjutan setidaknya harus memiliki lima karakter dasar yang harus digunakan sebagai pedoman. **Pertama**, pemimpin yang *moral-driven*. Pemimpin yang *moral-driven* merupakan pemimpin yang mempertimbangkan secara baik apakah kebijakannya bermanfaat bagi manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya, sehingga pemimpin tersebut memiliki kompas moral yang jelas dan terarah. Karakter pemimpin ini yang biasanya sukar ditemui di dalam proses-proses menentukan berbagai kebijakan, salah satunya kebijakan yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan. Sehingga prinsip maupun karakter tersebut harus menjadi pedoman dasar bagi seorang pemimpin. **Kedua**, pemimpin keberlanjutan harus memiliki cara pandang maupun cara berpikir yang holistik. Seorang pemimpin harus berpikir dalam sebuah perspektif sistem. Sehingga pemimpin tersebut harus melihat dan percaya bahwa segala sesuatunya terhubung dan jika salah satunya rusak, maka akan mengganggu keseluruhan kerja sistemnya. Karena berpikir dalam sistem, pemimpin keberlanjutan memikirkan dengan sangat matang kebijakan yang akan dia ambil, sehingga tidak merusak sistem yang sudah terbangun selama ini (Akbari, 2022). **Ketiga**, berpikiran terbuka (*open mindness*) juga merupakan karakter yang sangat penting ada pada diri seorang pemimpin keberlanjutan. Di

tengah tingginya tingkat *volatilitas*, ketidakpastian serta kompleksitas sebuah permasalahan, atau yang lebih akrab dikenal dengan istilah VUCA saat ini, banyak dinamika yang tentu akan mempengaruhi kebijakan yang dibuat. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu mengidentifikasi tren yang sedang terjadi dan mengubahnya menjadi peluang membuat kebijakan yang bisa menjawab tantangan dan berkontribusi terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat dan alam semesta. **Keempat**, pemimpin keberlanjutan harus menjalankan kepemimpinannya dengan empati. Seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan emosional yang baik, karena pemimpin keberlanjutan memahami dengan baik setiap persoalan yang muncul dan pemimpin tersebut memiliki pemahaman bahwa untuk mengubah sesuatu hendaknya dibutuhkan kesabaran dan kegigihan. Selain itu, sosok '*sustainable leaders*' mampu melihat situasi dari perspektif orang lain. Seorang pemimpin tidak mudah untuk menilai sesuatu. Pemimpin keberlanjutan juga tulus dan rendah hati. Pemimpin dengan pola tersebut harus mendorong value seseorang dan belajar darinya. Serta yang terakhir, tak kalah pentingnya, seorang '*sustainable leaders*', harus berani mewujudkan visinya, mengetahui bahwa perjuangan bersama yang dilakukan tentu akan berdampak pada masyarakat dan alam merupakan sebuah hal yang penuh dengan tantangan. Oleh karena itu, pemimpin keberlanjutan perlu kreatif dan inovatif dalam menemukan jalan terbaik mewujudkan visinya (Akbari, 2022).

Kepemimpinan keberlanjutan (*sustainable leadership*) tentunya harus didorong dengan konteks kebijakan yang baik pula, tentang bagaimana kepemimpinan dalam pemerintahan harus *concern* terhadap kelangsungan atau keberlanjutan dalam jangka panjang. Fokus itu nantinya akan terlihat dari cara pandang dan pola pikirnya, yang termanifestasikan dalam bentuk praktik kebijakan yang dibuatnya (Di Fabio & Peiró, 2018).

Praktik-praktik baik tentang kepemimpinan keberlanjutan (*sustainable leadership*) yang mendorong pada percepatan pencapaian SDGs

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

8 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

tentu telah banyak diadopsi oleh pemimpin-pemimpin di level daerah bahkan di desa yang juga memiliki target SDGs Desa. Penelitian sebelumnya telah penulis lakukan untuk melihat praktik baik seorang kepala desa di Desa Ketapanrame, Mojokerto, Jawa Timur yang berhasil mengimplementasikan beberapa pilar SDGs Desa. Potensi Desa di desa Ketapanrame, Mojokerto tersebut mampu dikelola secara maksimal sehingga berhasil membentuk 6 (enam) unit usaha pada BUMDES yang berkontribusi sangat besar bagi PADes nya. Tidak hanya itu, desa wisata yang dikelola oleh BUMDES dan Pokdarwis Desa Ketapanrame tersebut berhasil meraih kategori terbaik pertama Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2023. Kegigihan kepala desa dalam mengelola potensi desanya serta BUMDES yang ada di desa tersebut tentu membawa dampak yang sangat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desanya. Potret keberhasilan pengelolaan BUMDES berbasis potensi desa di Ketapanrame, Mojokerto tentunya dibangun atas peran kepemimpinan kepala desa yang memiliki cara pandang keberlanjutan bagi kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan di desa Ketapanrame tersebut. Keberhasilan tersebut juga diwujudkan melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, masyarakat, komunitas, swasta, dan media. Kolaborasi menjadi kata kunci mendasar keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Desa (SDGs Desa). Hadirnya konsep kolaborasi pentahelix menjadi jawaban atas tantangan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di desa dalam aspek kolaborasi (Yunas, 2024).

Sejatinya memang aspek kepemimpinan keberlanjutan (*sustainable leadership*) harus didorong untuk dimiliki serta dipedomani oleh para pemimpin di negeri ini baik di level nasional maupun lokal, dalam rangka melakukan strategi maupun aksi percepatan pencapaian target SDGs. Tentu ikhtiar mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan ini bukan hanya harus dilakukan satu atau dua orang saja, melainkan harus ada komitmen bersama seluruh stakeholder terkait. Sehingga kata kunci kedua yang cukup penting harus dilakukan dalam

rangka ikhtiar pencapaian target SDGs tersebut adalah kolaborasi. Praktik-praktik baik di daerah yang lahir dari pemimpin-pemimpin visioner, serta didukung dengan kolaborasi berbagai aktor yang baik, tidak hanya sekedar menjadi inspirasi melainkan harus menjadi refleksi mendalam terhadap aksi maupun strategi konkrit untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen bersama di tingkat global yang tentu memiliki tujuan mulia untuk bagaimana mendorong pembangunan yang dapat menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi dan keberlanjutan ekologis. Perspektif pembangunan berkelanjutan melihat proses serta dampak pembangunan tidak hanya pada saat ini saja, melainkan juga memikirkan tentang masa depan yang akan datang. Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) tersebut memang tidaklah mudah, apalagi saat ini hampir semua Negara dituntut untuk mampu menyempurnakan capaian di tahun 2030 mendatang. Hanya tersisa sedikit waktu untuk menggenapi target pembangunan berkelanjutan tersebut. Sehingga yang paling dibutuhkan adalah rencana aksi dan strategi konkrit dari semua pihak. Salah satu aspek mendasar dalam upaya akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan adalah aspek kepemimpinan. Kepemimpinan berkelanjutan (*sustainable leadership*) dengan lima karakter dan prinsip yang dimiliki mutlak harus menjadi pedoman bagi para pemimpin baik di level Nasional maupun Daerah yang memiliki visi besar untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka upaya mencapai optimalisasi kepemimpinan berkelanjutan, tentu langkah konkrit yang harus dicapai adalah bagaimana seorang pemimpin menetapkan visi yang sejalan dengan prinsip-prinsip SDGs dan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Serta, diperlukan juga penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pengembangan yang fokus pada *sustainable leadership* dan memberikan kesempatan bagi sumber daya manusia yang ada (calon-calon

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

8 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

pemimpin) untuk berkontribusi pada inisiatif berkelanjutan. Tidak hanya itu, untuk mendorong serta menguatkan model kepemimpinan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, diperlukan kolaborasi dengan semua pihak, baik dari sektor swasta, kelompok masyarakat sipil (NGO/CSO), akademisi hingga media.

REFERENSI

- Akbari, T. T. (2022). *Kenapa Indonesia Butuh Lebih Banyak Sustainable Leaders?* Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2022/06/14/08000051/kenapa-indonesia-butuh-lebih-banyak-sustainable-leaders-#google_vignette
- Afandi, M.N., Anomsari, E.T., Novira, A. (2021). A Conceptual Model of Localizing the SDGs: Lesson Learned from the Local Development Plan and Practice in Indonesia. *Review of International Geographical Education Online*, 11 (8).
- Agustina, I., Pradesa, H.A. (2024). Praktek Pelaporan Keberlanjutan Di Indonesia: Sebuah Telaah Kritis Atas Literatur Terdahulu. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi dan Perpajakan (Jemap)*, 7 (1), 24 - 46. <https://doi.org/10.24167/jemap.v7i1.10947>
- Artisa, R. A. (2023). Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Studi Kasus: Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 11(01), 61. <https://doi.org/10.35450/jip.v11i01.349>
- Bappenas. (2023). Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. In 2023 (Vol. 01).
- Di Fabio, A., & Peiró, J. M. (2018). Human capital sustainability leadership to promote sustainable development and healthy organizations: A new scale. *Sustainability (Switzerland)*, 10(7). <https://doi.org/10.3390/su10072413>
- Khairina, E., Purnomo, E. P., & Malawnai, A. D. (2020). Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (Sustainable Development Goals: Environmentally Friendly Policies to Maintain Environmental Resilience in Bantu. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 155.
- Kharisma, B. (2014). Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 19(1), 9–30.
- Nanus, W. B. B. (2006). *Leaders: The Strategies For Taking Charge*. Harper & Row.
- Nurbaiti, Hasibuan, R. R. A., & Siregar, S. N. (2023). Konsep Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan) Berbasis Sosial dan Ekonomi terhadap Perlindungan Sumber Daya Alam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Manajemen Akuntansi*, 3(2), 1190–1199.
- Suparmoko, M. (2020). Pembangunan Nasional Dan Regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(1), 39–50.
- UNDP. (2022). *Sustainable Development Goals (SDGs)*. UNDP. https://www.dev-practitioners.eu/media/key_documents/SDGs_Booklet_Web_En.pdf
- Taufik, N., Pradesa, H., & Agustina, I. (2022). Persepsi Risiko Pada Pemerintahan Desa: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 16(1), 120-135. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v16i1.353>
- Yunas, N. S. (2024). Penta-Helix Collaboration Approach in Achieving of SDGs Desa : Best Practice from Ketapanrame Village , Mojokerto , East Java. *The Malaysian Journal of Social Administration*, 18(3), 271–290. <https://doi.org/https://doi.org/10.22452/18/271.290>